

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Harniati dalam Bhinadi (2017), menjelaskan bahwa dimensi kemiskinan begitu kompleks sehingga diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis kemiskinan yaitu kemiskinan alamiah dikarenakan kualitas dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang rendah, kemiskinan kultural dikarenakan sikap yang tidak ingin mengubah kehidupannya meskipun terdapat yang ingin membantunya, dan kemiskinan struktural yang disebabkan tatanan kelembagaan dengan kebijakan pemerintah menyebabkan masyarakat terkurung dan terus mengalami kemiskinan sehingga menjadi turun temurun.

Isu kemiskinan merupakan salah satu isu global yang selalu menjadi perhatian bersama. Bahkan dalam kegiatan pembangunan global yang lebih dikenal dengan istilah *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah menetapkan salah satu tujuan (*goals*) SDGs/TPB dari 17 goals yang ada yaitu mewujudkan “tanpa kemiskinan (*no poverty*)” di Tahun 2030. Target “tanpa kemiskinan” ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi setiap negara di dunia untuk dapat mencapainya. Dalam konteks Negara Indonesia, hal ini sudah diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang selalu menjadi fokus utama pemerintah di dalam menyusun kebijakan pembangunan. Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini berarti perlu ada intergrasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain

penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai *stakeholder* yang terkait. (Rakhmat, 2019)

Mendukung pernyataan dari Rakhmat di atas bahwa untuk menyelesaikan masalah kemiskinan perlu adanya intergrasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah, maka dengan dukungan langsung dari pemerintah daerah, pemerintah pusat membuat dan membangun program bantuan sosial untuk menangani semua masalah masyarakat di wilayah yang paling kecil seperti desa. Kementerian Sosial Republik Indonesia mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. SLRT adalah sistem layanan yang mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegratif dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin berdasarkan profil penerima manfaat dalam daftar penerima manfaat, menghubungkan antara penerima manfaat, serta memperkuat sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan adalah tujuan penyelenggaraan SLRT.

Menurut Buku Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT dan Puskesmas (2021) SLRT adalah sistem layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk mengimplementasikan program

SLRT, diantaranya yaitu melakukan sosialisasi program kepada masyarakat, melakukan verifikasi data penerima bantuan, dan menyalurkan bantuan secara tepat waktu dan efektif. Sedangkan implementasi Pemerintah Daerah (Pemda) berperan dalam mengimplementasikan program SLRT di wilayahnya masing-masing. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melakukan pendataan dan verifikasi data penerima bantuan di wilayahnya, serta menyalurkan bantuan secara tepat sasaran dan efektif.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat jumlah penduduk miskin Kota Solok pada tahun 2023 sebanyak 2,35 ribu jiwa atau 3,05%. Angka ini memiliki kenaikan dibandingkan dengan angka kemiskinan di tahun 2022 yaitu sekitar 3,02% atau 2,28 ribu jiwa. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut dibentuklah Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang biasa disebut dengan SLRT yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Pemerintah Kota Solok berusaha mendirikan Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Dari tahun 2016, sistem ini berfungsi sebagai layanan satu pintu untuk mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Solok. Sistem ini terus diperbarui untuk membantu menemukan keluhan dari masyarakat miskin dan rentan yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan menghubungkan

mereka dengan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dimiliki oleh pemerintah.

Merujuk dari data BPS Provinsi Sumatera Barat di atas yang mempresentasikan kenaikan angka kemiskinan di Kota Solok menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya Kota Solok memiliki 13 kelurahan namun PUSKESOS baru berdiri di dua kelurahan saja yaitu Kelurahan Nan Balimo dan Kelurahan VI Suku sehingga proses pelayanan kesejahteraan sosial di 11 kelurahan lainnya ditangani oleh SLRT Dinas Sosial Kota Solok.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat penelitian terdahulu oleh Firda Awaliah, dkk. (2021) yang berjudul “Implementasi SLRT Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Serang”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi SLRT di Kota Serang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dari segi komunikasi, sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh karena hanya dilakukan pada 6 Kelurahan yang ada di Kota Serang. Dari segi sumber daya manusia di setiap PUSKESOS kurang memadai karena jumlah masyarakat yang melakukan pengaduan tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia di PUSKESOS, sarana prasarananya juga belum memadai sehingga PUSKESOS harus menggunakan sarana dan prasarana milik Kelurahan seperti komputer dan tab fasilikator harus digunakan secara bergantian. Dari segi disposisi, masih banyaknya pengaduan masyarakat yang belum terselesaikan dan tidak adanya kejelasan jangka waktu penyelesaian

pengaduan yang dilakukan masyarakat. Dan dari segi struktur birokrasi, alur pelayanan SLRT di setiap PUSKESOS belum tersedia, jadi petugas PUSKESOS harus menjelaskanterlebih dulu alur pelayanannya.

Adapun penelitian terdahulu yang lain seperti yang telah dilakukan oleh Al Mahfud dan Siti Nuraini pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) oleh Dinas Sosial dalam Penanganan kemiskinan di Kota Bekasi”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi efektivitas dalam penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) oleh Dinas Sosial dalam penanganan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) oleh Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif, sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, studi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

Teori yang digunakan pada penelitian oleh Al Mahfud dan Siti Nuraini yaitu teori efektivitas menurut Sukoco (2020) yang berlandaskan pada 4 aspek yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Berdasarkan aspek ketepatan sasaran pada program SLRT di Kota Bekasi sudah dilaksanakan dengan maksimal dengan sasaran masyarakat fakir miskin yang telah terdata di DTKS, dengan keluhan terbanyak di bidang kesehatan, pendidikan dan bantuan sosial. Aspek sosialisasi pada penelitian ini sudah dilakukan cukup maksimal, akan tetapi proses nya tertunda akibat masalah covid-19 sehingga dialihkan menggunakan media online yang sudah disediakan. Aspek tujuan, SLRT Dinas Sosial Kota Bekasi sudah menjalankan fungsi dan tujuannya.

Hal ini dapat dilihat dari mudahnya masyarakat dalam mengakses pelayanan secara satu pintu. Walaupun masih ada kendala di lapangan jaringan. Sedangkan aspek pemantauan program SLRT di Dinas Sosial Bekasi dilakukan selama 3 bulan sekali turun langsung ke fasilitator di tingkat kelurahan, laporan yang sering di dapati adalah terkait layanan kesehatan dan rekomendasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), namun ada beberapa kendala dilapangan yaitu masyarakat sring mengeluh dan merasa dipermainkan bahwa layanan ini berbelit-belit.

Kemudian penelitian selanjutnya yang berjudul “Implementasi Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kelurahan Wates Kecamatan Megarsari Kota Mojokerto” oleh Zulia Sa’idah pada tahun 2019. Tujuan dari peneltian yang dilakukan oleh Zulia Sa’idah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang ada dalam Sistem Layanan dan Kebijakan Terpadu yangada di Kelurahan Wates Kecamatan Megarsari Kota Mojokerto. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode deskriptif, dan menggunakan teknik analisis.

Berikut adalah tabel yang mencantumkan perbandingan antara peneliti sebelumnya dengan penelitianyang akan dilakukan oleh penulis

Tabel 2.1.Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Oleh Dinas Sosial	AL Mahfud dan Siti Nuraini	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggamabarkan terkait belum maksimalnya	1. Metode penelitian kualitatif deskriptif.	Latar penelitian di Kota Bekasi sedangkan peneliti di Kota Solok serta variabel

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	dalam Penanganan Kemiskinan di Kota Bekasi.		kebijakan program SLRT di Kota Bekasi, hal ini dapat dilihat dari belum tepat sasaran program bantuan, serta masih adanya anggapan masyarakat terkait sistem SLRT yang berbelit-belit.		penelitian yang peneliti laksanakan menggunakan variabel implementasi sedangkan penelitian terdahulu menggunakan variabel efektivitas
2.	Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Untuk Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bojonglora Kota Bandung	Mina Aura Amalia	Implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk meminimalkan kemiskinan di Kecamatan Bojonglora Kaler belum berjalan secara optimal dilihat dari segi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.	1. Variabel terkait Implementasi 2. Metode penelitian kualitatif deskriptif	Latar penelitian di Kota Bandung sedangkan peneliti di Kota Solok serta Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terbaru dilihat dari teori dan variabel yang peneliti gunakan.
3.	Implementasi Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kelurahan Wates	Zulia Sa'idah	Penelitian ini mengemukakan bahwa implementasi SLRT sudah berjalan dengan baik, meskipun pada	1. Variabel terkait Implementasi 2. Metode	Latar penelitian di Kota Mojokerto sedangkan Peneliti di Kota

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Kecamatan Megarsari Kota Mojokerto		kenyataann ya masih terdapat beberapa hambatan baik dari faktor internal maupun eksternal. Permasalahan diantaranya yaitu adanya penyampaian informasi yang kurang merata mengakibatkan masih banyak masyaraka tyang belum mengenal SLRT diKota Mojokerto, sumber daya manusia di tingkat kelurahan yang kurang aktif dalam menjalankan perannya.	penelitian kualitatif deskriptif	Solok serta Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terbaru dilihat dari teori dan variabel yang peneliti gunakan.

Sumber : Pelaksanaan Penelitian Tahun 2024

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dimana pada penelitian ini menggunakan perspektif pekerja sosial. Dimana pada penelitian ini akan memberikan suatu rancangan program pada BAB V yang memuat upaya pemecahan masalah yang ditemui, peran-peran pekerja sosial, serta teknik-teknik pekerja sosial . Rancangan program yang diajukan merupakan alternatif solusi dari permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, **perlu dilakukannya sebuah analisis untuk mengetahui keberhasilan suatu program** dalam penanganan sebuah permasalahan. Menganalisis implementasi Sistem Layanan Rujukan

Terpadu (SLRT) As-Syifa Dinas Sosial Kota Solok dapat dilakukan dengan model implementasi program dari para ahli salah satunya yaitu George Edward III.

Menurut George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi program, antara lain yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Peneliti menggunakan model ini dikarenakan model ini sesuai dengan program yang peneliti teliti serta permasalahan yang terdapat dalam program seperti bantuan yang dibatasi dan bantuan yang belum memenuhi kebutuhan sasaran.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Implementasi Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) As-Syifa Dinas Sosial Kota Solok"**, untuk mendapatkan gambaran secara empiris terkait pelaksanaan program SLRT dari segi implementasi terkait komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka problematik penelitian ini adalah **"Bagaimana Implementasi Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) As-Syifa Dinas Sosial Kota Solok?"** dengan sub-sub problematik sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi program SLRT As-Syifa dalam aspek komunikasi ?
- b. Bagaimana implementasi program SLRT As-Syifa dalam aspek sumber daya ?
- c. Bagaimana implementasi program SLRT As-Syifa dalam aspek disposisi ?

- d. Bagaimana implementasi program SLRT As-Syifa dalam aspek struktur birokrasi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan, adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini terbagi dua yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai implementasi Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) As-Syifa yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Solok. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana program ini dioperasikan dalam konteks lokal, bagaimana berbagai komponen dan aktor yang terlibat berinteraksi untuk mencapai tujuan program, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan dari adanya penelitian ini secara khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisis implementasi program SLRT As-Syifa dari aspek komunikasi.
- b. Mengkaji dan menganalisis implementasi program SLRT As-Syifa dari aspek sumber daya.
- c. Menganalisis implementasi program SLRT As-Syifa dari aspek disposisi.

- d. Menganalisis implementasi program SLRT As-Syifa dari aspek struktur birokrasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya pada pihak-pihak yang terkait. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan peneliti untuk mengembangkan pengetahuan dalam praktik pekerjaan sosial. Menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). Hasil penelitian ini dapat memberikan penjelasan ilmiah tentang Implementasi Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan Kemiskinan di Kota Solok yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi ilmu pekerjaan sosial.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan memberikan kontribusi dalam penyusunan dan pengembangan kebijakan dan upaya pembenahan masalah yang berkaitan dengan implementasi program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan kemiskinan di Kota Solok. Manfaat lain penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait dalam mengoptimalkan implementasi sistem serupa di daerah lain.

Serta dengan adanya penelitian ini dapat menambah dan melatih kemampuan berpikir penulis sehingga realisasi dari teori dan konsep yang diperoleh dari lingkungan perkuliahan dapat dikaitkan dan diimplementasikan di lapangan terkait peningkatan implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu oleh Dinas Sosial dalam penanganan kemiskinan di Kota Solok.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian Implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) As-Syifa oleh Dinas Sosial Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat disusun berdasarkan sistematika penulisan skripsi guna mempermudah dalam menyusun dan menganalisis penelitian. Penelitian ini terdiri dari enam bab yang terbagi menjadi beberapa sub-bab, antara sub-bab dengan sub-bab lainnya memiliki batasan dan keterkaitan . Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

- BAB I** : PENDAHULUAN, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, serta sistematika penulisan.
- BAB II** : KAJIAN KONSEPTUAL, memuat mengenai sistematis penelitian terdahulu dan memuat teori-teori dan konsep-konsep terkait topik penelitian yang berasal dari berbagai ahli yang dapat dipertanggung jawabkan di mana sumber-sumber dalam kajian konseptual dimasukan dalam daftar pustaka. Beberapa tinjauan konseptual dalam penelitian yaitu, tinjauan tentang implementasi, kemiskinan, Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), dan teori pekerjaan

sosial.

- BAB III : METODOLOGI PENELITIAN, mencakup desain penelitian, penjelasan tentang penelitian yang dilakukan, latar belakang penelitian, sumber data dan cara penentuan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.
- BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, mencakup analisis dan deskripsi hasil penelitian, serta pembahasan mengenai Implementasi program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) As-Syifa oleh Dinas Sosial Kota Solok.
- BAB V : USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksanaan program, metode dan teknik, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan, dan indikator keberhasilan.
- BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN, memuat tentang simpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi pemangku kepentingan yang terlibat serta penelitian lanjutan